

# STUDI KOMPARATIF PENGATURAN STANDARISASI DI INDONESIA DAN TAIWAN TERHADAP PRODUK MIE INSTAN

## ABSTRAK

Konsumen selaku pengguna produk sudah semestinya memerlukan adanya jaminan keamanan atas konsumsi suatu produk. Produsen dalam melakukan pemasaran atas produknya harus memperhatikan hak-hak konsumen guna menjalankan aktivitas bisnis yang memiliki etika dan tanggung jawab. Pangan merupakan sebuah kebutuhan pokok dalam diri seseorang dan pemenuhannya menjadi komponen atas HAM sebagai bagian fundamental guna menciptakan SDM dengan kualitas yang baik. Negara juga berkewajiban menciptakan keterjangkauan, ketersediaan, serta memenuhi konsumsi pangan secara aman, cukup, berkualitas, dan memiliki gizi seimbang. Pada kasus ini didapati bila standar mutu pangan yang dimiliki pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan memiliki perbedaan ketentuan batas aman zat dalam pengawet, berkenaan dengan ini Indonesia menggunakan standar BPOM dan Indonesia merupakan anggota Codex Alimentarius Commission (CODEX) Alimentarius Commission (CAC) yang telah memperoleh pengakuan secara internasional. Akan tetapi kondisi ini menjadi konflik sebab Taiwan menerapkan standar yang berlainan yakni dilarangnya zat Methyl P-Hydroxybenzoate pada produk pangan. Selain itu, Taiwan tidak bergabung dalam CODEX, yang mana berakibat produk Indomie dicekal peredarannya di Taiwan dan Hong Kong. Penelitian ini dibuat dengan maksud membandingkan pengaturan standarisasi di Indonesia dan Taiwan terhadap produk mie instan. Metode penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penulis mengkaji dan mempelajari norma yang dimuat pada peraturan perundang-undangan maupun norma lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** Indomie, Konsumen, Mie Instan, Pengaturan Standarisasi, Perlindungan Konsumen.

## **COMPARATIVE STUDY OF STANDARDIZATION ARRANGEMENTS IN INDONESIA AND TAIWAN ON INSTANT NOODLE PRODUCTS**

### **ABSTRACT**

*Consumers as users of products should need a guarantee of safety for the consumption of a product. Producers in marketing their products must pay attention to consumer rights in order to carry out business activities that have ethics and responsibility. Food is a basic need in a person and its fulfillment is a component of human rights as a fundamental part of creating human resources with good quality. The state is also obliged to create affordability, availability, and meet food consumption safely, adequately, quality, and have balanced nutrition. In this case, it was found that the food quality standards owned by the Indonesian government and the Taiwanese government have differences in the provisions of the safe limit of substances in preservatives, in this regard Indonesia uses BPOM standards and Indonesia is a member of the Codex Alimentarius Commission (CODEX) Alimentarius Commission (CAC) which has obtained international recognition. However, this condition is a conflict because Taiwan applies a different standard, namely the prohibition of Methyl P-Hydroxybenzoate in food products. In addition, Taiwan did not join the CODEX, which resulted in Indomie products being banned from circulation in Taiwan and Hong Kong. This study was made with the intention of comparing standardization settings in Indonesia and Taiwan with instant noodle products. This research method uses a normative juridical approach method, namely the author examines and studies the norms contained in laws and regulations and other norms based on Law Number 8 of 1999 related to consumer protection.*

**Keywords:** *Indomie, User, Instant Noodles, Standardization Settings. Consumer Protection.*